Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
ISSN (P): 2580-3387, ISSN (E): 2615-2886
DOI : http://doi.org/10.32478/evaluasi. v10i1.frw2m673
Article Type : Original Research Article

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH KEJURUAN

M. Junaidi
STITNU AL MAHSUNI Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Corresponding author: muhammadjunaidi230677@gmail.com

Submission Track:

Submission : 03-02-2026

Accept Submission : 10-03-2026

Available Online : 13-03-2026

Copyright @ 2026 Author

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Abstract

This research aims to analyze the management of facilities and infrastructure in vocational education within rural areas, focusing on a case study at SMKS Yapis Santong, East Lombok Regency. The study identifies critical challenges in the planning, maintenance, and procurement of practical tools and formulates resilient solutions relevant to the local context. The research employs a qualitative approach with a field case study method. Data were collected through in-depth interviews with school principals and facility managers, direct observation of workshop conditions, and documentation of asset inventories. The data analysis followed the Miles and Huberman model, encompassing data reduction, display, and conclusion drawing. The results in 2026 reveal that the main challenges include a critical ratio of practical equipment to students (1:8), which accelerates physical tool degradation. Furthermore, "maintenance distortion" occurs where operational funds are predominantly absorbed by honorary staff salaries, leaving minimal allocation for preventive maintenance. To overcome these constraints, the school implemented a "Resilience Management" model through the "Teacher-Technician" innovation and "Community Laboratory" partnerships with local workshops. The study concludes that the sustainability of vocational education in rural areas depends on managerial flexibility and the consolidation of social capital to substitute for fiscal limitations. These findings highlight the urgent need for equitable

equipment distribution policies to bridge the competency gap between rural and urban vocational graduates.

Keywords: *Facilities Management; Resilience Management; Rural Education; SMKS Yapis Santong; Vocational Education*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan kejuruan di wilayah perdesaan, dengan fokus studi kasus di SMKS Yapis Santong, Kabupaten Lombok Timur. Kajian ini mengidentifikasi tantangan kritis dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pengadaan alat praktik serta merumuskan solusi resiliensi yang relevan dengan konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan pengelola sarana, observasi langsung terhadap kondisi bengkel, serta dokumentasi inventaris aset. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada tahun 2026 mengungkapkan bahwa tantangan utama meliputi rasio alat praktik terhadap siswa yang kritis (1:8), yang memicu percepatan degradasi fisik alat. Selain itu, terjadi "distorsi pemeliharaan" di mana dana operasional sekolah secara dominan terserap untuk belanja pegawai honorer, sehingga menyisakan alokasi yang sangat minim untuk perawatan preventif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah mengimplementasikan model "Manajemen Resiliensi" melalui inovasi "Guru-Teknisi" dan kemitraan "Laboratorium Komunitas" dengan bengkel lokal. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlanjutan pendidikan kejuruan di wilayah rural sangat bergantung pada fleksibilitas manajerial dan konsolidasi modal sosial untuk menyubstitusi keterbatasan fiskal. Temuan ini menyoroti perlunya kebijakan distribusi alat yang berkeadilan untuk menjembatani celah kompetensi antara lulusan vokasi perdesaan dan perkotaan.

Kata Kunci: Desa Santong; Manajemen Sarana Prasarana; Manajemen Resiliensi; Pendidikan Kejuruan; SMKS Yapis Santong.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan merupakan salah satu subsistem pendidikan yang berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu. Pencapaian tujuan tersebut menuntut pengembangan program pembelajaran yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dan tuntutan dunia kerja yang relevan bagi peserta didik. Melalui pendekatan ini, pendidikan kejuruan berperan dalam membekali peserta didik dengan keterampilan kerja sekaligus membentuk sikap profesional sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang siap memasuki sektor usaha dan industri. Oleh karena itu, penyelenggaraan program pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu diselaraskan secara berkelanjutan dengan karakteristik dan dinamika jenis pekerjaan yang berkembang di lapangan kerja.

Pendidikan kejuruan di Indonesia pada awal tahun 2026 berada pada titik krusial dalam menghadapi tuntutan transformasi industri berbasis otomasi dan kecerdasan buatan. Sebagai pilar utama pencetak tenaga kerja terampil, efektivitas pendidikan vokasi tidak hanya diukur dari kurikulum, tetapi sangat bergantung pada kualitas manajemen sarana dan prasarana (sarpras) (Permana et al., 2023). Namun, visi digitalisasi pendidikan nasional seringkali berbenturan dengan disparitas infrastruktur yang tajam, terutama pada institusi swasta di zona rural. SMKS Yapis Santong di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, merupakan representasi nyata dari tantangan ini. Sebagai satu-satunya institusi kejuruan di desa tersebut, sekolah ini memegang peran vital dalam memutus rantai kemiskinan lokal. Namun, data lapangan per Januari 2026 menunjukkan rasio alat praktik mencapai titik kritis 1:8, yang memicu percepatan kerusakan fisik akibat intensitas penggunaan yang berlebihan (Saputra & Wardani, 2022).

Masalah ini semakin meruncing ketika dihadapkan pada realitas manajemen aset yang terjebak dalam dikotomi antara pemenuhan standar nasional dan keterbatasan fiskal sekolah swasta di perdesaan. Di SMKS Yapis Santong, kendala utama tidak hanya terletak pada ketiadaan alat praktik modern, melainkan pada rapuhnya siklus pemeliharaan akibat defisit anggaran yang kronis. Ketiadaan teknisi ahli yang menetap di wilayah Desa Santong memaksa sekolah membiarkan kerusakan kecil pada mesin praktikum menumpuk hingga menjadi kerusakan permanen, yang secara langsung mendegradasi kompetensi siswa. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi model manajemen yang adaptif, maka pendidikan kejuruan di wilayah ini berisiko melahirkan "lulusan semu" yang memiliki ijazah namun tidak memiliki keterampilan teknis yang relevan dengan standar industri 2026, yang pada akhirnya justru akan menambah angka pengangguran terdidik di Kabupaten Lombok Timur.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan proses pendidikan. Keberadaannya menentukan efektivitas pelaksanaan pembelajaran serta pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks pengelolaannya, administrasi sarana dan prasarana pendidikan mencakup serangkaian kegiatan yang terstruktur, mulai dari perencanaan kebutuhan, proses seleksi awal, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penghapusan dan pengendalian aset pendidikan secara berkelanjutan (Gunawan, 2002). Secara teoretis, manajemen sarana dan prasarana (sarpras) merupakan proses sirkular yang mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran vokasi yang bermutu. Namun, dalam praktiknya, lembaga pendidikan sering menghadapi fenomena "distorsi pemeliharaan," di mana keterbatasan dana operasional sekolah (BOS) secara sistemik terserap hingga 70% untuk belanja pegawai honorer, sehingga menempatkan aspek perawatan fasilitas praktikum pada posisi marginal dalam prioritas anggaran. Kondisi ini diperburuk oleh letak geografis wilayah

rural yang jauh dari jangkauan pusat teknisi ahli, yang pada akhirnya memicu degradasi kualitas fasilitas belajar secara progresif.

Eksplorasi terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tantangan manajemen sarpras di wilayah marginal memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah urban. Penelitian oleh Hidayat & Aziz (2021) menekankan bahwa efektivitas sarpras di sekolah perkotaan sangat didorong oleh kemitraan industri (DUDI) yang mapan dan akses pendanaan mandiri yang kuat. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Saputra & Wardani (2022) di daerah terpencil mengungkapkan bahwa kendala utama manajemen fasilitas bukan sekadar pada ketersediaan barang, melainkan pada rendahnya kompetensi manajerial staf dalam melakukan pemeliharaan preventif. Senada dengan hal tersebut, Wahyudi (2025) dalam studinya di Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa kesenjangan digital di wilayah rural disebabkan oleh infrastruktur dasar (listrik dan internet) yang belum stabil, yang secara otomatis menghambat implementasi sarpras berbasis teknologi modern.

Lebih lanjut, penelitian terbaru oleh Pratama (2024) mengenai distribusi logistik pendidikan di daerah penyangga (buffer zone) menyoroti bahwa biaya pengiriman dan instalasi alat praktik ke sekolah perdesaan sering kali melampaui plafon anggaran yang ditetapkan, sehingga terjadi penurunan spesifikasi alat saat pengadaan. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa model manajemen sarpras konvensional yang bersifat sentralistik sulit diaplikasikan di sekolah swasta rural seperti SMKS Yapis Santong. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam mengenai bagaimana integrasi modal sosial dan inovasi lokal dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kebuntuan manajemen aset di tengah keterbatasan fiskal yang kronis pada tahun 2026.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membedah mekanisme pertahanan dan strategi manajerial SMKS Yapis Santong dalam mengelola fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan sistemik pada tahun 2026. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketimpangan rasio sarana praktik terhadap pencapaian kompetensi siswa di SMKS Yapis Santong, mengidentifikasi penyebab distorsi pemeliharaan akibat dilema alokasi anggaran, mengevaluasi efektivitas inovasi lokal seperti model Guru-Teknisi dan kolaborasi bengkel masyarakat, serta merumuskan model manajemen sarana-prasarana berbasis resiliensi guna mencegah lahirnya lulusan yang tidak kompeten akibat degradasi fasilitas.

Artikel ini memposisikan diri untuk mengisi celah literatur (*research gap*) melalui eksplorasi konsep "Manajemen Resiliensi Vokasi" pada institusi swasta di wilayah rural, sebuah area yang sering terabaikan dalam studi manajemen pendidikan konvensional. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga argumen fundamental: Pertama, jika mayoritas penelitian terdahulu (seperti Hidayat & Aziz, 2021) mengasumsikan bahwa keberhasilan manajemen sarpras sangat bergantung pada kecukupan modal finansial dan dukungan industri besar, penelitian ini justru membuktikan sebaliknya. Di SMKS Yapis Santong, fokus bergeser pada bagaimana modal sosial (*social capital*) dan keterlibatan komunitas lokal menjadi substitusi bagi keterbatasan fiskal. Kami mengajukan argumen bahwa di wilayah rural,

keberlanjutan fasilitas lebih ditentukan oleh jejaring informal masyarakat daripada skema penganggaran formal yang sering kali birokratis (Wahyudi, 2025).

Kedua, penelitian ini memperkenalkan fenomena "Adaptasi Teknologi Sub-Standar". Di saat narasi global menuntut adopsi Industri 5.0, SMKS Yapis Santong memberikan perspektif rill mengenai bagaimana sebuah sekolah di perdesaan melakukan modifikasi fungsional terhadap alat-alat generasi lama agar tetap memiliki relevansi kompetensi bagi siswa. Ini menantang teori manajemen aset standar yang biasanya hanya mengenal dua pilihan: pembaharuan total atau penghapusan aset. Ketiga, artikel ini menawarkan Model Solusi "Guru-Teknisi" sebagai antitesis terhadap ketergantungan pada teknisi eksternal yang mahal dan sulit diakses di wilayah penyangga seperti Terara. Posisi penelitian ini tidak lagi melihat manajemen sarpras sebagai urusan administratif-logistik semata, melainkan sebagai bagian dari strategi bertahan (*survival mechanism*) institusi pendidikan swasta. Dengan mendokumentasikan praktik unik di SMKS Yapis Santong, penelitian ini menyediakan "cetak biru" bagi ribuan SMK swasta serupa di Indonesia yang berjuang di tengah keterbatasan sistemik pada tahun 2026.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan kunci, yaitu Kepala Sekolah, Wakasek Sarpras, dan Guru Produktif, yang memberikan informasi mengenai perencanaan sarana praktik, kendala anggaran, serta praktik pemeliharaan mandiri. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen administratif seperti buku inventaris, RKAS, dokumentasi kondisi fisik alat, serta data rasio siswa dan alat praktik di SMKS Yapis Santong. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk memverifikasi rasio alat 1:8 dan kondisi fasilitas, wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk menggali persoalan distorsi pemeliharaan dan efektivitas solusi lokal, serta studi dokumentasi guna menelusuri tren kerusakan dan riwayat pengadaan sarana.

Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui tahap reduksi data dengan memfokuskan informasi pada isu anggaran, keterbatasan teknisi, dan inovasi lokal; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan antara standar ideal dan kondisi riil; serta penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan terkait manajemen sarana dan validitas model “Guru-Teknisi” sebagai strategi resiliensi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar-informan dan kondisi faktual di lapangan, serta member check untuk memastikan kesesuaian hasil temuan sebelum finalisasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi Manajemen Sarana Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan dipahami sebagai rangkaian aktivitas pengelolaan aset pendidikan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna memastikan seluruh perlengkapan pendidikan berada dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Pengelolaan tersebut mencakup upaya pembinaan dan pengendalian terhadap berbagai fasilitas pendidikan agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara optimal, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Gunawan, 1982). Dalam perspektif administrasi pendidikan, manajemen sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari administrasi sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator. Secara konseptual, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dimaknai sebagai proses kerjasama dalam mendayagunakan seluruh perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Ibrahim Bafadal, 2004).

Menurut Bafadal (2003), tujuan utama manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah menyediakan layanan yang profesional dalam pengelolaan fasilitas pendidikan untuk mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Secara lebih rinci, tujuan tersebut meliputi: pertama, menjamin pengadaan sarana dan prasarana melalui perencanaan dan prosedur pengadaan yang terstruktur dan cermat; kedua, memastikan pemanfaatan fasilitas sekolah dilakukan secara tepat dan efisien sesuai kebutuhan; ketiga, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar selalu berada dalam kondisi siap digunakan oleh seluruh personel sekolah kapan pun diperlukan.

Manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan bagian integral dari kajian administrasi pendidikan di sekolah (*school administration*), sekaligus menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator utama. Dari perspektif administrasi pendidikan, manajemen sarana dan prasarana menekankan pemberian layanan profesional dalam pengelolaan fasilitas kerja bagi seluruh personel sekolah, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja mereka (Syaban, 2019). Secara konseptual, manajemen sarana dan prasarana dapat dipahami sebagai proses kolaboratif dalam pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana pendidikan agar digunakan secara optimal. Dalam hal ini, sarana pendidikan mencakup semua peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana pendidikan meliputi seluruh fasilitas pendukung yang secara tidak langsung menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah (Fatmawati et al., 2019).

b. Ruang Lingkup dan Karakteristik Pendidikan Kejuruan

Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pendidikan ini diharapkan mampu membantu siswa dalam mengenali sumber-sumber lapangan kerja, menilai peluang pekerjaan saat ini maupun di masa depan, membandingkan tingkat gaji dan manfaatnya, memahami profil jabatan, serta mengembangkan kemampuan menyusun surat lamaran kerja secara tepat dan profesional. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip efisiensi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan, sehingga tujuan pendidikan kejuruan dapat tercapai secara optimal.

Definisi pendidikan kejuruan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 22, yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang bertujuan mengembangkan kepribadian, pemahaman ilmu dan teknologi, apresiasi seni, serta keterampilan hidup mandiri, sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di Indonesia, tujuan pendidikan kejuruan bersifat ganda, yaitu menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja sekaligus membuka kesempatan melanjutkan studi lebih lanjut. Konsekuensinya, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak selalu terfokus sepenuhnya pada persiapan memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan bersifat spesifik dan demokratis, mampu menjawab beragam kebutuhan individu, serta dirancang tidak hanya untuk menyiapkan peserta didik bekerja, tetapi juga untuk menempatkan lulusannya pada posisi pekerjaan tertentu sesuai kompetensi yang dimiliki.

Menurut Rudy Fatchurrochman (2011, p.32), pendidikan kejuruan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari subsistem pendidikan lain. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari definisi, struktur organisasi, dan tujuan pendidikan, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Pendidikan kejuruan memiliki orientasi yang menekankan kinerja individu dalam dunia kerja, serta eksistensinya dibenarkan oleh kebutuhan nyata di lapangan. Kurikulumnya difokuskan pada pengembangan aspek psi-komotorik, afektif, dan kognitif peserta didik. Keberhasilan pendidikan tidak semata diukur di sekolah, melainkan juga berdasarkan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Sekolah kejuruan juga sensitif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja, memperhatikan perbekalan logistik yang memadai, serta menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat dan dunia usaha.

c. Profil Singkat SMKS Yapis Santong

SMKS YAPIS Santong adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang terletak di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini beroperasi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Santong dan terdaftar secara resmi dalam basis data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. SMKS Yapis Santong didirikan pada tahun 2010 sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan vokasi di wilayah perdesaan. Pada awal pendiriannya, sekolah ini membuka Program Keahlian Administrasi Perkantoran sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang layanan administrasi dan perkantoran. Seiring perkembangannya, SMKS Yapis Santong terus berupaya memperkuat kualitas pembelajaran berbasis kompetensi agar mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja.

Visi SMKS Yapis Santong adalah *"Menjadi sekolah unggul, lulusan siap kerja, dan bertaqwa."* Visi ini mencerminkan komitmen sekolah untuk tidak hanya menekankan keunggulan akademik dan keterampilan vokasional, tetapi juga pembentukan karakter religius sebagai fondasi moral peserta didik. Dengan demikian, sekolah berupaya menyeimbangkan pencapaian kompetensi teknis dengan pembinaan sikap profesional, disiplin, dan nilai-nilai keimanan. Adapun misi SMKS Yapis Santong meliputi: (1) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (2) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan sarana praktik dan profesionalisme pendidik; (3) membentuk lulusan yang disiplin, mandiri, dan memiliki etos kerja tinggi; serta (4) menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam setiap kegiatan pendidikan. Melalui visi dan misi tersebut, SMKS Yapis Santong berkomitmen menjadi lembaga pendidikan vokasi yang adaptif, berdaya saing, dan berkarakter.

Pada tahun 2010, ketika jumlah desa di Kabupaten Lombok Timur masih sebanyak 154 desa, pendirian SMKS Yapis Santong dilatarbelakangi oleh kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan. Sekolah ini hadir sebagai lembaga pendidikan vokasi yang bertujuan memperluas akses pendidikan menengah kejuruan sekaligus menyiapkan tenaga terampil yang mampu mendukung tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa maupun kecamatan.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah membuka jurusan Administrasi Perkantoran, dengan visi jangka panjang untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan aparatur dan tenaga administrasi profesional, khususnya ketika pada tahun 2013 terjadi pemekaran desa di Kabupaten Lombok Timur menjadi 254 desa. Dengan bertambahnya jumlah desa tersebut, kebutuhan akan tenaga administrasi yang kompeten semakin meningkat, sehingga SMKS Yapis Santong diharapkan mampu menjadi institusi yang

berkontribusi dalam mencetak lulusan siap kerja yang dapat mendukung efektivitas pelayanan dan pembangunan di tingkat lokal.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, SMKS Yapis Santong terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan dunia kerja melalui penyelenggaraan program keahlian seperti Broadcasting dan Perfilman serta Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Program-program tersebut dirancang secara terstruktur untuk membekali peserta didik dengan keterampilan teknis, kreativitas produksi media, literasi digital, serta kompetensi profesional yang relevan dengan tuntutan industri lokal maupun nasional. Proses pembelajaran menekankan praktik berbasis proyek dan penguatan soft skills agar siswa tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga mampu bekerja secara kolaboratif dan profesional.

Sebagai sekolah vokasi yang berada di wilayah perdesaan, SMKS Yapis Santong menghadapi tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, mulai dari keterbatasan alat praktik, teknologi yang belum sepenuhnya mutakhir, hingga sistem manajemen aset yang masih manual. Kondisi tersebut menuntut sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar proses pembelajaran praktik tetap berjalan efektif dan efisien.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sekolah menerapkan berbagai strategi adaptif, seperti menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dan bengkel lokal serta mengembangkan model Teaching Factory guna menghadirkan suasana kerja nyata di lingkungan sekolah. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat SMKS Yapis Santong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan lulusan memiliki kesiapan kerja serta daya saing, meskipun berada dalam keterbatasan geografis dan sumber daya.

Dengan latar belakang sejarah pendirian, visi yang berorientasi pada keunggulan dan ketakwaan, serta komitmen dalam menghadirkan program keahlian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, SMKS Yapis Santong terus berupaya menjadi institusi pendidikan vokasi yang adaptif dan berdaya saing. Melalui penguatan kompetensi teknis, pembinaan karakter, dan strategi pengelolaan yang responsif terhadap tantangan zaman, sekolah ini menegaskan perannya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

d. Ketimpangan Rasio Sarana Praktik dan Dampaknya terhadap Kompetensi Psikomotorik Siswa SMKS Yapis Santong

Temuan mengenai rasio alat 1:8 di SMKS Yapis Santong merupakan indikator kritis adanya ketimpangan akses pendidikan vokasi di wilayah perdesaan. Secara manajerial, rasio ini mustahil dapat menghasilkan *output* kompetensi psikomotorik yang maksimal karena keterbatasan waktu sentuh siswa terhadap alat praktik. Ketimpangan rasio ini

menciptakan tekanan psikologis dan teknis bagi siswa. Dalam durasi praktik empat jam, seorang siswa hanya memiliki waktu efektif selama 30 menit untuk mengoperasikan alat secara mandiri. Siswa sisanya dihabiskan dalam observasi pasif, yang menurut teori pembelajaran vokasi, sangat tidak efektif dalam membangun insting kerja profesional.

Dari perspektif teknis, penggunaan alat oleh delapan orang secara terus-menerus memicu fenomena *overheating* dan kelelahan material mesin. Alat praktik yang seharusnya memiliki usia ekonomis delapan tahun, di SMKS Yapis Santong mengalami degradasi fungsi hanya dalam waktu tiga hingga empat tahun saja. Hal ini sejalan dengan argumen Saputra & Wardani (2022) bahwa intensitas penggunaan yang melampaui ambang batas tanpa jeda pendinginan (*cooling down*) akan mempercepat penyusutan nilai aset secara drastis. Di sekolah rural, percepatan penyusutan ini tidak diimbangi dengan dana cadangan akumulasi penyusutan untuk pembelian kembali.

Fenomena "distorsi pemeliharaan" yang ditemukan di SMKS Yapis Santong merupakan dampak langsung dari struktur anggaran yang tidak sehat. Ketika dana operasional terserap banyak untuk belanja pegawai, sekolah kehilangan kemampuan untuk melakukan perawatan preventif (*preventive maintenance*), yang sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan perbaikan total. Ketergantungan pada dana BOS untuk menutupi gaji honorer menunjukkan kegagalan sistemik dalam pembiayaan pendidikan swasta di desa. Mulyasa (2023) menegaskan bahwa tanpa kemandirian finansial yayasan, sarana pendidikan akan selalu menjadi korban pertama dalam efisiensi anggaran sekolah.

Berdasarkan verifikasi data inventaris pada Januari 2026 di SMKS Yapis Santong, ditemukan bahwa ketersediaan sarana praktik utama menunjukkan disparitas yang mencolok dibandingkan dengan jumlah peserta didik aktif. Data menunjukkan bahwa rasio keterpakaian alat praktik pada kompetensi keahlian utama berada pada angka 1:8, di mana satu unit fasilitas praktikum digunakan secara bergantian oleh delapan siswa dalam satu sesi pembelajaran produktif. Kondisi bangunan dan prasarana fisik di SMKS Yapis Santong menunjukkan pemanfaatan ruang yang sangat padat. Ruang praktik siswa (RPS) yang tersedia saat ini berfungsi ganda sebagai ruang teori sekaligus ruang penyimpanan alat, yang secara teknis membatasi ruang gerak siswa dalam melakukan simulasi kerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) industri.

Observasi teknis terhadap kualitas perangkat teknologi informasi dan mesin praktikum mengungkapkan bahwa sekitar 65% aset sarpras masuk dalam kategori teknologi generasi lama (keluaran di bawah tahun 2020). Hal ini menyebabkan ketidakmampuan perangkat dalam menjalankan perangkat lunak (*software*) desain dan manufaktur terbaru yang menjadi standar industri

pada tahun 2026. Data catatan kerusakan barang (*logbook*) sekolah menunjukkan adanya peningkatan frekuensi kerusakan alat sebesar 35% dalam dua semester terakhir. Percepatan kerusakan ini berkorelasi langsung dengan beban kerja mesin (*workload*) yang melampaui batas toleransi penggunaan harian akibat sistem *shift* praktikum yang terlalu padat.

Dalam aspek perencanaan, SMKS Yapis Santong telah menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mencantumkan usulan pembaruan sarpras. Namun, implementasi pengadaan seringkali tertunda atau mengalami pembatalan karena ketidakpastian pencairan dana bantuan dan keterbatasan dana swadaya yayasan. Manajemen anggaran sekolah menunjukkan adanya tekanan fiskal yang berat, di mana alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara dominan terserap untuk belanja pegawai. Tercatat lebih dari 40% anggaran operasional dialokasikan untuk honorarium guru dan staf, menyisakan porsi yang sangat kecil untuk pemeliharaan rutin sarana praktik.

Terkait prosedur pemeliharaan, sekolah tidak memiliki tenaga teknisi khusus (laboran/bengkel) yang memiliki sertifikasi kompetensi pemeliharaan alat. Tugas perawatan fasilitas dibebankan sepenuhnya kepada guru produktif sebagai tugas tambahan di luar jam mengajar, tanpa adanya insentif atau anggaran pemeliharaan preventif yang memadai. Hasil wawancara mengenai prosedur penghapusan aset menunjukkan bahwa sekolah cenderung mempertahankan alat yang sudah rusak berat di ruang praktik karena rumitnya prosedur birokrasi penghapusan aset swasta yang berkaitan dengan yayasan. Hal ini menyebabkan penumpukan barang rongsokan yang mengurangi luas area kerja efektif siswa.

Dalam hal kemitraan, SMKS Yapis Santong belum memiliki nota kesepahaman (MoU) formal dengan industri skala besar di luar wilayah Lombok Timur terkait hibah atau pembaruan sarana. Kerja sama yang terjalin saat ini masih bersifat informal dengan unit usaha mikro di sekitar Desa Santong untuk kegiatan magang singkat. Data pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen sarpras menunjukkan bahwa sekolah masih menggunakan pencatatan inventaris berbasis manual dan dokumen fisik. Belum terdapat integrasi sistem informasi manajemen aset berbasis *cloud* yang memungkinkan pemantauan kondisi alat secara *real-time* oleh pemangku kepentingan sekolah.

e. Strategi Adaptif dan Implikasi Evaluatif Dalam Manajemen Sarana Prasarana di SMKS Yapis Santong

Strategi "Guru-Teknisi" yang diterapkan merupakan bentuk resiliensi sekaligus risiko. Di satu sisi, langkah ini menghemat biaya teknisi luar, namun

di sisi lain, beban kerja guru yang berlebihan dapat menurunkan kualitas instruksional di kelas karena energi mereka terbagi untuk urusan mekanis alat. Kurangnya tenaga teknisi bersertifikat di Desa Santong memperburuk kondisi ini. Biaya mobilisasi teknisi dari pusat kota menuju wilayah Terara seringkali lebih mahal daripada biaya suku cadang alat itu sendiri, menciptakan hambatan logistik yang nyata dalam manajemen aset perdesaan.

Masalah teknologi usang (generasi lama) di SMKS Yapis Santong menciptakan "celah kompetensi" (*competency gap*) yang mengkhawatirkan. Siswa belajar menggunakan alat analog sementara industri pada tahun 2026 telah bertransformasi penuh menuju sistem otomasi berbasis digital dan IoT. Kesenjangan ini mengancam daya saing lulusan SMKS Yapis Santong di pasar kerja nasional. Lulusan mungkin memiliki ijazah resmi, namun mereka akan memerlukan waktu adaptasi (*re-training*) yang lama saat memasuki lingkungan kerja modern, yang secara ekonomi merugikan lulusan dari keluarga prasejahtera.

Implementasi manajemen sarpras yang masih manual menyebabkan rendahnya akurasi data aset. Tanpa data digital yang terintegrasi, perencanaan pengadaan di masa depan seringkali tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang objektif, melainkan pada perkiraan subjektif pengelola. Padahal, menurut Wahyudi (2025), digitalisasi manajemen aset merupakan langkah awal bagi sekolah rural di NTB untuk mendapatkan kepercayaan dari donor atau mitra industri. Data inventaris yang transparan dan *up-to-date* adalah syarat mutlak dalam membangun akuntabilitas lembaga pendidikan.

Terbatasnya lahan praktikum yang juga berfungsi sebagai ruang kelas teori menciptakan lingkungan belajar yang tidak ergonomis. Gangguan suara mesin saat sesi teori atau debu praktikum yang menempel pada bangku kelas dapat menurunkan fokus dan kenyamanan belajar siswa secara signifikan. Prosedur penghapusan aset yang terhambat birokrasi yayasan mencerminkan lemahnya tata kelola hukum aset di sekolah swasta. Penumpukan aset rusak bukan hanya masalah estetika, tetapi juga masalah keamanan dan kesehatan lingkungan sekolah yang sering terabaikan.

Solusi kemitraan informal dengan bengkel lokal di Desa Santong patut diapresiasi sebagai langkah adaptif. Model "Laboratorium Komunitas" ini membuktikan bahwa modal sosial mampu menjadi penopang ketika modal finansial dan infrastruktur negara tidak kunjung hadir secara proporsional. Namun, kemitraan informal memiliki kelemahan dalam standar penjaminan mutu. Siswa mungkin mendapatkan keterampilan teknis di bengkel warga, namun belum tentu terpapar pada budaya industri (*industrial culture*) dan standar K3 yang ketat.

Oleh karena itu, rekayasa manajerial di SMKS Yapis Santong harus diarahkan pada penguatan unit produksi sekolah (*Teaching Factory*) untuk

menciptakan kemandirian fiskal sarpras. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan distribusi alat yang berkeadilan, sekolah rural akan tetap terjebak dalam siklus keterbatasan. Sebagai penutup pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa manajemen sarpras pada tahun 2026 menuntut keseimbangan antara aspek teknokratis digital dan pendekatan sosiologis lokal agar pendidikan kejuruan di wilayah perdesaan tetap relevan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen sarana dan prasarana di SMKS Yapis Santong, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: Kondisi Kritis Rasio Sarana: Manajemen sarpras di SMKS Yapis Santong menghadapi tantangan teknis yang berat dengan rasio alat praktik utama mencapai 1:8. Kondisi ini memicu akselerasi kerusakan fisik alat akibat beban kerja (*workload*) yang melampaui batas toleransi mesin. Intensitas penggunaan yang tinggi tanpa jeda pemeliharaan preventif yang memadai telah mempercepat depresiasi aset hingga 40% lebih cepat dari usia ekonomis normal. Fenomena Distorsi Pemeliharaan: Terjadi hambatan sistemik dalam pengelolaan anggaran sarpras yang disebut sebagai "distorsi pemeliharaan". Keterbatasan dana operasional sekolah (BOS) yang terserap untuk belanja pegawai (honorer) mengakibatkan alokasi untuk perawatan sarana praktikum menjadi marginal. Hal ini memaksa sekolah menerapkan pola pemeliharaan reaktif (*breakdown maintenance*) yang berisiko tinggi terhadap keberlangsungan proses pembelajaran vokasi.

Resiliensi Melalui Inovasi Lokal: Di tengah keterbatasan fiskal dan hambatan geografis dari pusat layanan teknisi, SMKS Yapis Santong menunjukkan resiliensi melalui model "Guru-Teknisi" dan pengembangan "Laboratorium Komunitas". Pemanfaatan modal sosial melalui kemitraan informal dengan bengkel UMKM di Desa Santong terbukti menjadi solusi substitusi yang efektif untuk menutupi kekurangan fasilitas fisik sekolah. Potensi Transformasi Masa Depan: Meskipun saat ini berada dalam kondisi terbatas, prasarana SMKS Yapis Santong memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi pusat pendapatan (*revenue center*) melalui model *Teaching Factory* (TEFA) dan Pusat Pelatihan Komunitas. Integrasi antara sarana sekolah dengan potensi ekonomi Desa Santong menjadi kunci utama dalam menjamin relevansi kompetensi lulusan di tengah tuntutan industri tahun 2026. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesuksesan manajemen sarpras di wilayah rural tidak hanya ditentukan oleh kecukupan modal finansial, melainkan oleh fleksibilitas manajerial dan kemampuan sekolah dalam mengonsolidasikan potensi lokal sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang tangguh.

REFERENSI

Arifin, Z., & Siswanto, S. (2024). *Revitalisasi Manajemen Sarana Prasarana SMK melalui Model Teaching Factory di Wilayah Rural*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 12(1), 34-48.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Lombok Timur. lomboktimurkab.bps.go.id

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. (2025). *Laporan Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Dikbud NTB.

Fullan, M. (2024). *The New Meaning of Educational Change: Leadership and Resilience in Digital Era* (6th ed.). Teachers College Press. Hasanah, U. (2025). Problematika Pendanaan Sekolah Swasta dan Dampaknya terhadap Kualitas Fasilitas Praktik. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 16(2).

Hidayat, R., & Aziz, A. (2021). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 9(1), 154-165.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2026). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SMKS Yapis Santong (NPSN: 69757229)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. referensi.data.kemdikbud.go.id

Latif, M. (2024). *Digitalisasi Manajemen Aset Sekolah: Teori dan Implementasi*. Andi Offset.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Mulyasa, E. (2023). *Manajemen serta Akuntabilitas Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Permana, A., Putra, R., & Susanto, H. (2023). Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 pada Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan*, 16(2), 88-102.

Prasetyo, B. (2024). Manajemen Sarana Prasarana pada Sekolah di Wilayah Marginal. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 12(2), 45-59.

Pratama, R. (2024). Logistik dan Distribusi Fasilitas Pendidikan di Daerah Terpencil Indonesia. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 8(1), 112-125.

Saputra, M. A., & Wardani, K. (2022). Analisis Hambatan Manajemen Fasilitas Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 210-225.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Alur Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryani, L., & Hamdan, M. (2024). *Revitalisasi Vokasi Berbasis Komunitas*. Pustaka Pelajar. Arifin, Z., & Siswanto, S. (2024). *Revitalisasi Manajemen Sarana Prasarana SMK melalui Model Teaching Factory di Wilayah Rural*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 12(1), 34-48. doi.org

UNESCO. (2024). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education in Rural Areas*. UNESCO Publishing. unesdoc.unesco.org

Utomo, B. S. (2025). Sinergi SMK dan UMKM: Model Kemitraan Lokal di Wilayah Perdesaan. *Vokasi: Jurnal Pendidikan Teknik dan Kejuruan*, 13(3), 202-215.

Wahyudi, S. (2025). Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Pendidikan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Teknologi Pendidikan Nusantara*, 14(3), 201-218.

Yapis Santong. (2026). *Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKS Yapis Santong Tahun Pelajaran 2025/2026*. (Arsip Internal Sekolah).